

DESEMBER
Korban
Juta
ikirim ke R
tuk dimint
m dibawa p
emukakan.
polisi belu
ik terang
peramp
knya ter
aru pertam
itan.
kan sadis in
inggu (20/12
ukul 23.00
an yang se
nan pulang
onoro ter
n mobil Nop
rena ada t
oannya.
tiga kawana
ul dan lang
n celurit ke
ng meminta
ng Rp 100
kejadian
mukan be
dan gagan
adiguna
rampok d
aksinya.

SUGATAN

angan cemasan masyarakat

halaman 2

halaman 3

halaman 6

halaman 7

PEMERINTAH DAERAH
Skr. Pem. Daerah Ist
Yogyakarta

BERNAS

HARGA ECERAN Rp. 1.000,00 - 12 Halaman



MINYAK REM :

- SHELL DONAX B - DOT 3

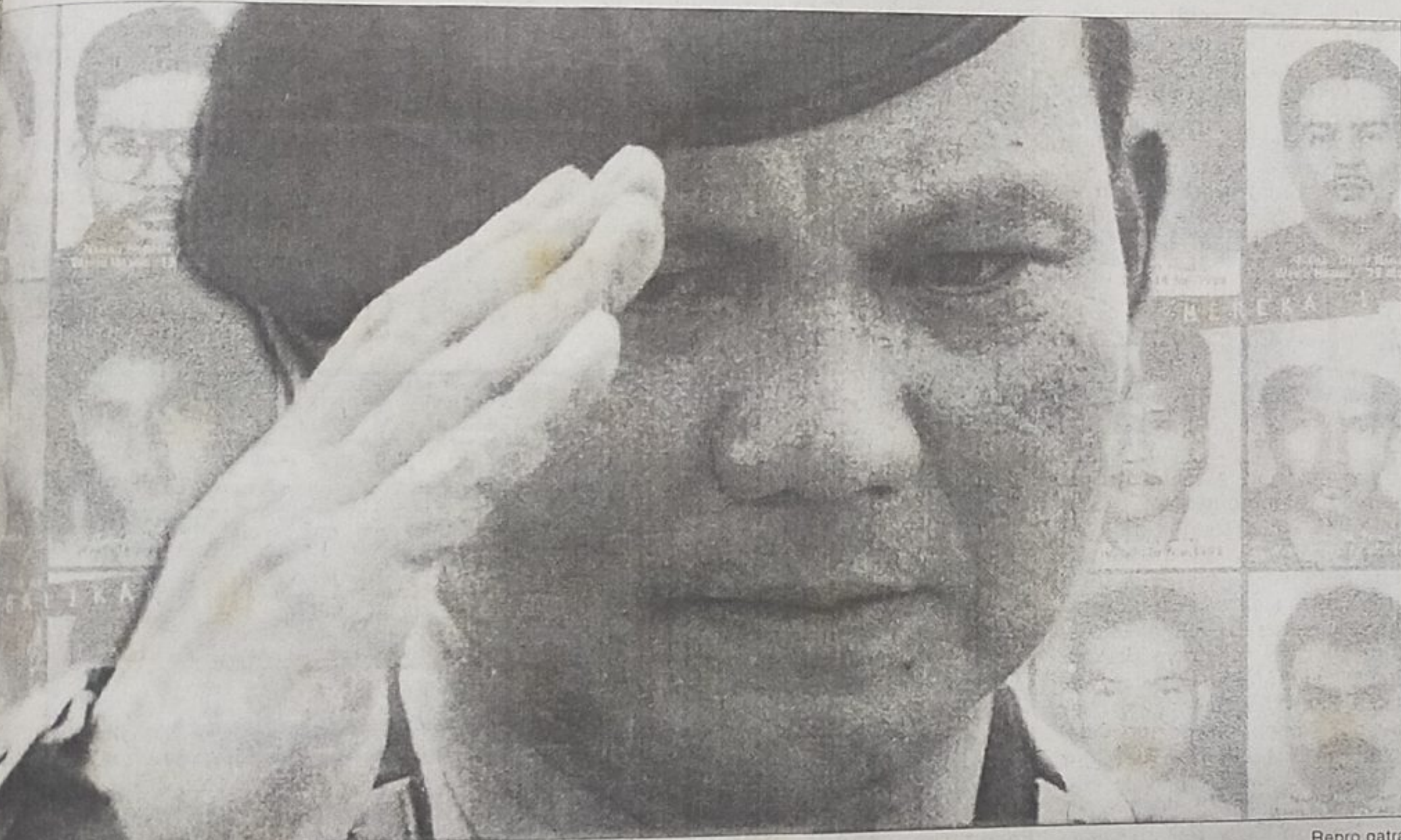
- SHELL DONAX YB - DOT 4

MENJAMIN KENYAMANAN DAN KEAMANAN BERKENDARA

NO. 039 TAHUN KE-53

HING, 23 DESEMBER 1998

Ada Skenario Loloskan Prabowo ke Yordania



Repro gatra

Jakarta, Bernas

Lolosnya mantan Pangkostrad Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto ke Yordania bukan tanpa rencana. Menurut Koordinator Kontras (Komisi Nasional untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan), Munir SH, di Jakarta Selasa (22/12), skenario meloloskan Prabowo ke Yordania sudah terciptam sejak Prabowo diperiksa Dewan Kehormatan Perwira (DKP), September lalu.

Prabowo yang tidak hadir pada wisuda purnawira di Magelang yang baru lalu, bahkan sudah menjadi warga negara Yordania melalui Dekrit Raja Hussein. Dia sebelumnya dibarkan menjalankan ibadah umroh di Mekah, Arab Saudi.

Munir tidak terkejut mengetahui dari pemberitaan bahwa Prabowo yang juga mantan Komandan Jenderal Kopassus itu sudah menjadi warga negara Yordania. Dia pun mengaku mendengar informasi itu pertama kali dari Amnesty International (AI), saat Prabowo dan sejumlah perwira Kopassus sedang diperiksa Dewan Kehormatan Perwira (DKP) dalam ka-

sus penculikan aktivis pro-demokrasi.

Menurutnya, ketika DKP sedang berjalan pada September lalu, orang-orang di AI itu sudah mengetahui adanya skenario yang akan meloloskan Prabowo ke Yordania. "Dan kita juga percaya kemungkinan itu bisa saja terjadi, dan sekarang memang terbukti. Pada waktu itu, kita sudah bilang kepada pemerintah bahwa harus ada upaya tindakan hukum untuk menghindari Prabowo lari, tapi tidak pernah dilakukan tindakan," kata Munir.

Munir menuturkan, kemungkinan Prabowo akan ke Yordania untuk menjadi pelatih

satuan elit di negeri Timur Tengah itu memang sudah jadi pembicaraan lama, terhitung sejak munculnya dugaan keterlibatan mantan mantan Presiden Soeharto itu dalam kasus penculikan para aktivis dan peristiwa kerusuhan bulan Mei di Jakarta dan kota-kota lain.

"Karena kalau Prabowo ke Eropa malah bisa ditangkap seperti Jenderal Pinochet, mantan Presiden Cili yang ditangkap di London, Inggris. Di Yordania itu satu-satunya ruang yang masih terbuka bagi Prabowo," ujar Munir.

Menanggapi lolosnya Prabowo ke Yordania, Munir mengatakan, pihak yang salah ad-

alah pemerintah Indonesia sendiri karena tidak cukup tegas melakukan penindakan secara hukum sesuai kewenangannya untuk menghindari jangan sampai seorang pelaku tindak pidana melarikan diri ke luar negeri. Padahal, katanya, pemerintah mempunyai kewenangan melakukan cekal (cegah-tangkal). "Ini malah Prabowo tidak dicekal, dia bilang pergi umroh, lalu nyelonong masuk ke Yordania," ujarnya.

Munir yakin Prabowo tidak akan lolos dari jerat hukum meskipun kini sudah jadi warga negara Yordania. Dia juga menyatakan, Kontras akan terus mengupayakan agar Prabowo

bisa dihadirkan kembali di tanah air, agar bersama sejumlah perwira militer dari Kopassus serta dari kesatuan lainnya bisa segera diajukan ke Mahkamah Militer.

Berita mengenai Prabowo kembali mencuat di Indonesia setelah Kompas (22/12) mengutip dari harian berbahasa Arab Al-Rai yang terbit di Amman, ibukota Yordania, tanggal 12 Desember 1998 yang menyebutkan, melalui sebuah Dekrit Raja Hussein, Prabowo dianugerahi status kewarganegaraan Yordania.

Menariknya, berita itu mun-

Bersambung ke hal 11 kol 3

Prabowo Ikut Adiknya Bisnis di Timur Tengah

Jakarta, Bernas

Pengusaha Hashim Djojohadikusumo, adik Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto, mengatakan kakaknya yang mantan Danjen Kopassus dan Pangkostrad itu kini berada di Amman, Yordania. Prabowo, kata Hashim, tidak bermaksud melepaskan status Warga Negara Indonesia (WNI)-nya. "Prabowo sudah empat bulan di Yordania bersama keluarganya," kata Hashim Djojohadikusumo kepada pers di Jakarta, Selasa (22/12).

Hashim juga menyebutkan, Prabowo sudah menyatakan akan ikut berbisnis dengan dirinya dan itu sudah diketahui petinggi-petinggi ABRI. "Dia akan jadi perwakilan bisnis di Timur Tengah," katanya.

Hashim menyatakan, keterangannya tentang pemberian kewarganegaraan istimewa dari Raja Yordania kepada Prabowo ini jangan dianggap sebagai konferensi pers, karena maksud dia cuma silaturahmi berkenaan bulan Ramadan kali ini.

Menurut dia, keberadaan

Prabowo di Amman, selain untuk keperluan Umroh ke Mekkah, adalah untuk menjalani pengobatan yang dijalani secara rutin sejak lama. "Dia kan tentara, penyakitnya banyak, seperti malaria, ginjal dan lever," katanya.

Takbir di Everest
Mengenai pemberian kewarganegaraan Yordania kepada Prabowo, dia mengatakan, keluarganya merasa bangga karena salah satu anggota keluarganya itu mendapat pengakuan di dunia internasional.

Alasan pemberian status kewarganegaraan istimewa itu, katanya, antara lain karena Raja Yordania merasa bangga ketika suara takbir bergema di puncak Gunung Everest pertama kali berkat kerja keras anggota pasukan khusus Indonesia ketika dipimpin Prabowo.

Latihan militer dan kerja sama komando khusus, katanya, merupakan hal-hal yang menjadikan kedekatan Prabowo dengan keluarga kerajaan Yordania semakin dekat, selain kedekatan Prabowo dengan putra Raja Yor-

dania, Pangeran Abdullah, semenjak sekolah di Amerika Serikat.

Menurut Hashim, Prabowo tidak akan melepaskan kewarganegaraan Indonesia, karena status kewarganegaraan yang diberikan Yordania adalah kehormatan, seperti penghormatan dari beberapa negara lain.

Lebih jauh lagi, Hashim juga membantah isu yang menyebutkan keluarga Sumitro Djojohadikusumo dan keluarga Prabowo melarikan diri ke luar negeri. "Tidak benar itu. Bukti-

nya saya yang sering ke luar negeri sebagai utusan Presiden tetap ada di sini sekarang, padahal kesempatan untuk kabur banyak," kata Hashim seperti dikutip Antara.

Sedangkan Prabowo, katanya, sudah menyatakan siap jika diperlukan untuk memberi keterangan di pengadilan, kapan saja pihak pengadilan memerlukannya. Prabowo termasuk pihak yang ikut bertanggung jawab terhadap kasus penculikan sejumlah aktivis saat ia menjadi Komandan Kopassus. (*)

Petisi 50 Tolak Rencana Gus Dur

Jakarta, Bernas

Kelompok Petisi 50 tidak setuju pada rencana akan diadakannya dialog nasional yang diprakarsai Ketua Umum PB NU, KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, melibatkan Presiden BJ Habibie, Pangab Jenderal TNI Wiranto dan mantan Presiden Soeharto.

Demikian dikatakan Ali Sadikin, selaku juru bicara Kelompok Kerja (Pokja) Petisi 50, pada acara jumpa pers tentang Catatan Akhir Tahun 1998 Melangkah Menuju Reformasi Total di kediaman mantan gubernur DKI itu, di Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (22/12).

Sementara itu, Khatib Am PB NU, Said Aqiel Siradj mengatakan, Gus Dur yang terus berupaya mempertemukan tokoh-tokoh demi rekonsiliasi nasional, bukan untuk mencari sensasional murahan yang me-

mbuat orang bingung semua. Namun semua itu dalam upaya mencari jalan keluar tentang persoalan nasional.

Hal itu dikatakan Said Aqiel Siradj dalam seminar Mencari Format Kampanye Pemilu 1999 yang diadakan Forum Dialog Wartawan Politik, Selasa, di Jakarta.

Pada bagian lain Kelompok Kerja (Pokja) Petisi 50 menilai, rencana rembuk nasional itu tidak akan berhasil karena tidak bersedianya Presiden Habibie menghadiri dialog tersebut.

Seperti diberitakan media massa, Habibie bersedia bertemu dengan mantan presiden Soeharto dalam kapasitas sebagai pribadi saja. Pokja Petisi 50 lebih setuju anjuran dialog nasional yang dilontarkan oleh Letjen TNI Agum Gumelar, karena dianggap mewakili semua golongan.

Ali Sadikin mengatakan, pada tahun 1993, Petisi 50 pernah mengajukan gagasan dialog nasional dengan syarat Soeharto sebagai presiden waktu itu harus bertemu dulu dengan sesepuh ABRI Jenderal (Purn) AH Nasution. Kedua tokoh itu dianggap mempunyai pandangan berbeda mengenai pembangunan. Nasution mempunyai pandangan bahwa pembangunan ekonomi harus sejalan dengan pembangunan politik sedangkan Soeharto tidak menyertakan pembangunan politik yang dianggap dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Gagasan Petisi 50 tersebut ternyata tidak ditanggapi oleh pemerintah.

Ali Sadikin mengaku bingung dengan langkah Gus Dur. Sebab, Ketua Umum PB NU itu

Bersambung ke hal 11 kol 5

PDI Perjuangan Tetap Gunakan

tiara Ramadan

Drs Moh As'ad SU Psi

sih dan Tanggung Jawab

ANG-orang Mukmin meyakini kehidupan dunia ini tidak sepi dari berbagai permasalahan. Semakin banyak penyanggah yang dirasakan, berbagai penanggungjawab dilakukan, berbagai macam penderitaan dihadapi, dan rupa-rupa keadaan dihadapi. Rekanan pengalaman hidup antara yang menyenangkan dan yang getir, antara suka dan duka, antara senang dan susah, antara gembira dan antara derita dan bahagia, antara kaya dan miskin. Antara Allah SWT menciptakan musibah (ujian) buat hamba-Nya, untuk mengetahui siapa yang paling tinggi derajatnya dalam mengerjakan amal perbuatan baik. Jelas yang dihadapi seorang manusia adalah dalam kebaikan-kebaikan yang merupakan "musibah" untuk menguji keimanan seseorang yang mengaku muslim.

Orde Baru hingga Orde Reformasi, banyak dan sering melalui media elektronik maupun cetak bentuk-

Bersambung ke hal. 11 kol. 1

Program
INTENSIF KHUSUS
LEMBAGA PENDIDIKAN
PRIMAGAMA
Bimbingan Belajar Persewaan Cawu, Eldoma, UMPTN
Kelas 5-6 SD, 1-2-3 SLTP, 1-2-3 SMU, Alumni

YOGYAKARTA : Jl. Sugeng Jeroni 49 Telp. 381514, Jl. C. Simanuntak 50 Telp. 566901
Jl. Kapt. P. Tendean 49 Telp. 378083, Jl. Sultan Agung 24 Telp. 379111, Jl. Kalurang Km. 5,8 (Ring Road Utara) Telp. 560561
Jl. Adisucipto 48 20 Telp. 512217, Jl. Laksa Adisucipto (Jari) 98, Jl. P. Diponegoro 98 Telp. 520418, 520419.

Hanya Rp 199.500
Mutar Bimbingan : 11 Januari 1999

Lewat SIM Warga DIY Setor Rp 4,41 Milyar per Tahun ke Tutut

Yogya, Bernas

Tak terasa warga Yogyakarta sudah membantu Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) lewat PT Citra Permata Persada dalam setiap mengurus SIM. Per bulan

Rp 30.000 (tahun 1990-an).

Tapi sejak ada komputerisasi SIM, saya terpaksa harus membayar sekitar Rp 70 ribu untuk memperpanjang masa berlaku SIM saya," ujar ibu muda dari Minggiran, Yogya,

Komentar senada diungkapkan pula oleh Kepala Polres Sleman Letkol Pol Drs Bambang PH. "Biaya administrasi SIM Rp 52.500 itu Polres tidak tahumenuh. Semua menjadi urusan pusat," ujarnya.

uang yang disetor ke kantong Tutut, ya tinggal menghitung saja dikalikan Rp 52.500.

Angka itu pun bisa dilihat dari polis asuransi yang dikeluarkan oleh PT Bhakti Bhayangkara DIY. Pada tahun 1997 per-